

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahdi Indonesia*. Jakarta : PT Rja Grafindo Persada.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Damas Dwi Anggaro ,dkk. 2023. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keunagan Pusat dan Daerah*. Malang : UB Press.
- Deddy Supriyady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Zuraida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Soebech. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: Sinar Grafika.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : Alumni.
- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada.
- M. Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Marihot Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*.
- Ni'matul Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nugrahani Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Ridwan. H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajja Grafindo.
- Saiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung : PT.Alumni.
- Siswanto Sunamo. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar: Sinar Grafika

Siswanto Sunarmo. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Soejono Soekonto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Hadjon, Philipus M. (1997). "Tentang Wewenang". *Jurnal Pro Justicia (Yuridika)*, Tahun XII, No. 5 & 6.

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1-1.

Hutagalung, Edward. 2016. "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widayapraja*, Vol. XLII, No. 1.

Rahmadewi, D. E. (2018). Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, penerimaan pembiayaan dan realisasi belanja modal provinsi bengkulu. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 5(01), 108-118.

Yunita, I., & Mubarak, A. (2025). Analisis kognitif persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Organisasi (ISO)*, Vol.5, No. 1

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keputusan Walikota Padang Nomor 227 Tahun 2024 Tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Melakukan Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.

